

# **PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM(LPJU)**

**Oleh :**

**Asido Sumando**

**Dosen Pembimbing : Drs. H.Isril, M.H**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Phone / Fax : +62 (0)761 , 63277

Website : <http://fisip.unri.ac.id>

asidosinaga@yahoo.co.id

## ***Abstract***

Pekanbaru as a growing city make pekanbaru as centers of trade in goods and services, almost 80 percent of the people to be around the urban environment as reflected in the crowded urban areas, unlike in the urban suburbs.

Especially at night, people do a lot of activities and of course have to use state facilities such as street lighting lamps. This facility would be one of supporting the needs of society, especially in the evenings, because a lot of people who work late night make this area very crowded at night and it happens nearly every day. Therefore, the role of local government is required to maintain and provide public facilities so that people become more secure.

The problem is there are plenty of street lighting lamps were extinguished it causes various problems occur such as a crime, a robbery, a motorcycle gang that makes people afraid to pass through the streets of the province of the lights were extinguished.

Keywords: Government Oversigh

dengan berbagai macam kegiatan dengan demikian kota merupakan

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian, perkembangan kota dan meningkatnya kebutuhan ekonomi secara langsung atau tidak langsung berpengaruh kepada meningkatnya kebutuhan akan kenyamanan dan ketentraman di Jalan Raya termasuk (LPJU) di kota, karena kota merupakan konsentrasi penduduk

wadah tempat tinggal atau pemukiman, kesempatan kerja, dan kegiatan pemerintahan dan sebagainya khususnya di malam hari.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam distribusi barang dan jasa,

peningkatan perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan bangunan pelengkap jalan, diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau adalah pusat Pemerintahan daerah dan pusat perkembangan daerah yang telah mengalami perkembangan pesat dengan jumlah penduduk dan pembangunan, tidak terlepas dari pelaksanaan dari program yang dicanangkan langsung oleh pemerintah pusat terhadap daerah.

Optimalisasi fungsi lampu jalan merupakan pelayanan dan juga kebutuhan mendesak. Apalagi, Pekanbaru telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota metropolitan, sesuai dengan visi pemerintah Kota Pekanbaru. Tapi fenomenanya sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Pekanbaru yang tidak menyala pada malam hari.

Berikut dibawah ini daftar titik lampu penerangan jalan umum resmi di Kota Pekanbaru tahun 2012-2014

**Tabel 1.1**  
**Daftar jumlah Titik Lampu Penerangan Jalan umum Resmi Kota Pekanbaru Tahun 2012**

No	Lokasi	Jumlah Jalan	Lampu Kabel Bawah Tanah		Lampu Kabel Udara	
			Son-T 400 Watt	Son-T 250 Watt	Son 250 Watt	HPL-N 250 Watt
1	Jalan Nasional	3		176		
2	Jalan Provinsi	20	1292	589	539	49
3	Jalan Kota	85		21	1550	30
Jumlah		108	1292	786	2089	79
		4246				

**Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru 2014**

Dari data yang tersedia pada tabel LPJU resmi tersebut terdapat beberapa ruas jalan yang tidak optimal

dalam penggunaan. LPJU yang tidak hidup diantaranya adalah Jalan Soebrantas ujung yakni pada simpang

empat arengka sampai simpang empat simpang baru, Jalan Soekarno Hatta dari simpang empat mal ska sampai simpang empat jalan durian dan jalan soekarno hatta menuju Batrai Q, Jalan Tanjung Batu, dan Jalan OKM Jamil tepatnya dibelakang Purna MTQ. Ini jelas membuat kenyamanan serta rasa aman masyarakat menjadi terganggu.dibelakang Purna MTQ. Ini jelas membuat kenyamanan serta rasa aman masyarakat menjadi terganggu.

Namun permasalahan lain karena jumlah penduduk dan bangunan yang semakin lama semakin tumbuh pesat adalah tentang banyaknya lampu jalan yang belum di meterisasi. Sebab

sampai saat ini banyak PJU belum di meterisasi yang bertebaran dan ini dinilai merugikan Pemko maupun PLN, namun di sisi lain masyarakat tersebut berhak

untuk mendapatkannya. Dari data yang tersedia daya PJU yang tercatat di PLN Cabang Pekanbaru sebesar 10.022.000 VA namun sampai saat ini tidak ada pembatasan yang jelas terhadap arus tersebut sehingga banyak lampu PJU yang melebihi dari standar yang Ditetapkan pemakaiannya. Berikut adalah daftar rekapitulasi rekening lampu jalan meterisasi dan non meterisasi

**Tabel 1.2**  
**Daftar Rekapitulasi Rekening Lampu**  
**Penerangan Jalan Non meterisasi dan non meterisasi pemerintah kota pekanbaru**  
**tahun 2012**

No	Bulan	Jumlah Tagihan	
		Meterisasi	Non Meterisasi
1	Januari	290.194.570	2.945.347.260
2	Februari	289.270.680	2.941.349.760
3	Maret	288.082.015	2.941.349.760
4	April	278.389.205	2.941.349.760
5	Mei	272.313.785	2.941.348.383
6	Juni	296.802.740	2.941.348.383
7	Juli	320.980.600	2.941.348.383
8	Agustus	300.242.810	2.941.348.383
9	September	312.618.855	2.941.348.383
10	Oktober	353.595.643	2.941.348.383
11	November	406.543.150	2.941.348.383
12	Desember	398.060.633	2.941.348.383

**Sumber : PLN Cabang Pekanbaru 2012**

Dari tabel diatas terdapat lebih besarnya pembayaran terhadap lampu jalan nonmeterisasi dibandingkan dengan lampu jalan meterisasi,

diketahui bahwa kerugian PLN untuk membayar lampu jalan yang belum di meterisasikan adalah sebanyak Rp 3,3M.

## Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan.

### 1.2.1 Pengawasan Pemerintah Daerah

#### a. Pengertian Pengawasan

**Sondang Siagian (2002 : 169)** pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan pengawasan secara filosofis, dapat dikatakan adalah mutlak perlu karena manusia bersifat salah.

#### b. Pengertian Pemerintahan

**(C. F. Strong)** Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

### 1.2.2 pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan

## Lampu Penerangan Jalan Umum

Dalam pengelolaan, pemerintah daerah seharusnya secara aktif dan positif dalam perekonomian yang dikaitkan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah daerah utamanya dalam bidang perekonomian adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan kerangka landasan hukum (peraturan daerah),
- b. Penyusunan kebijakan publik dan rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJM),
- (c) menyediakan (memberikan) pelayanan publik kepada masyarakat secara tepat, cepat, murah, dan bermutu.

## PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga daerah seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan(DKP) kota Pekanbaru yang dipilih untuk melaksanakan sebagian urusan negara untuk kepentingan masyarakat oleh karena itu DKP wajib melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsi DKP adalah melaksanakan pengawasan baik itu pengawasan terhadap pengelolaan, dan pengelolaan teknis di lapangan, pengawasan terhadap program-program yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DKP kota pekanbaru dalam penelitian ini diukur dengan indikator pedoman, pekerjaan, perbandingan, tindakan, perbaikan serta tindak lanjut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang didalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai pengawas dengan adanya pengawasan seorang pimpinan akan mampu untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan serta mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru, dimana fungsi pengawasan merupakan membantu seluruh manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan operasi rutin untuk melihat langsung kinerja pegawai harian. Sementara pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah meminta konfirmasi dari pengawas dan mandor di lapangan. Hal ini dinilai belum maksimal oleh penulis karena masih banyaknya ditemukan berbagai lampu yang padam.

Dalam hal ini penulis Pada bagian ini akan mengemukakan tentang pembahasan terhadap fokus penelitian yaitu pengawasan,

#### 1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung yang digunakan oleh atasan kepada bawahan terkait pekerjaan di lapangan yang dilakukan langsung oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan telah berjalan baik. Hanya saja kurangnya koordinasi antara pihak dinas Kebersihan dan pertamanan terhadap mandor yang bertugas di lapangan karena sudah ada mandor yang bertugas di lapangan.

#### 2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan adalah berupa penerimaan laporan dari teknisi atau petugas yang ada di lapangan baik secara tertulis ataupun secara bentuk dokumentasi. Pengawasan diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa pengawasan, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit ada beberapa alasan diperlukan nya pengawasan.

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Di Kota Pekanbaru**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan lampu penerangan jalan umum tersebut.

Dimana faktor-faktor tersebut antara lain :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini pegawai harian dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan,

namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia juga menjadi modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lampu penerangan jalan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pekanbaru. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengaduan terhadap dimana saja lampu jalan yang padam. Selain itu partisipasi masyarakat sangatlah penting agar pemerintah bisa dengan mudah memonitor di lapangan. Namun, apabila masyarakat tidak mampu melakukan partisipasi berupa pengaduan secara langsung, dapat disampaikan berupa penyampaian saran berupa tulisan di media cetak seperti koran.

## **3. Kemacetan**

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pekanbaru. Kemacetan mengakibatkan pekerjaan yang sedang dilakukan tidak berjalan lancar.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum adalah sebagai berikut ini.

1. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum karena masih belum baiknya koordinasi pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap teknisi dan

mandor yang ada di lapangan koordinasi yang bisa saja menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan selain itu belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu Sumber Daya Manusia, partisipasi masyarakat dan kemacetan

2. Dalam hal ini peneliti juga menganggap manajemen sebagai suatu yang sangat penting dalam pelayanan publik karena mempunyai satu kesatuan yang baik dengan dengan fungsi manajemen lainnya dari semua fungsi manajemen lainnya yang diuraikan pada BAB sebelumnya penulis menyimpulkan selain pengawasan fungsi pengorganisasian dan perencanaan merupakan fungsi manajemen pemerintahan daerah yang signifikan mempengaruhi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada fungsi perencanaan dinas kebersihan dan pertamanan masih belum menggunakan meterisasi di semua titik penerangan jalan umum yang ada di kota Pekanbaru.

## **SARAN**

Dari beberapa kesimpulan di atas maka guna meningkatkan pengawasan pemerintahan daerah dalam Pengelolaan

Lampu Penerangan Jalan umum pada masa yang akan datang perlu diperhatikan hal berikut ini.

1. Pengawasan dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru diharapkan mampu melakukan koordinasi yang baik dengan mandor ataupun anggota di lapangan hal ini bertujuan agar terjadi sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan.
2. Dinas kebersihan dan pertamanan diharapkan segera mengadakan pelatihan kepada Pegawai Harian Lepas (PHL) sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas.
3. Prasarana yang memadai sangat dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru agar pelaksanaan pengawasan, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dalam rangka pengelolaan lampu penerangan jalan umum lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Abdurahman. 2001, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Sinar Jakarta
- Arikunto, Suharsaimi, 1998., *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dunn William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta
- Handoko, 1998, *Manajemen* Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Ishak, 2010, *Posisi Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*, Penaku, Jakarta
- Kencana Inu Syafii, 1999, *Ilmu Administrasi publik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lan Ri, 2004 *sistem administrasi negara kesatuan republik Indonesia*, Jakarta, Lembaga Administrasi republik Indonesia.
- Pamudji S, 1985 *Pembinaan Perkotaan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Rahardjo Adisamita, *manajemen pemerintah daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Siagian S.P, 2002, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Gunung Agung, Jakarta
- Sujamto, 1989, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sukanto, 2002, *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, Sinar Grafika
- Surjadi, *pengembangan kinerja pelayanan publik*, PT Refika Aditan Bandung 2009

Sumber lainnya

Surat Kabar, *Lampu Jalan Banyak Mati*. Riau pos. 6 Agustus 2014  
[www.badanstandarnasional.indonesia.co.id](http://www.badanstandarnasional.indonesia.co.id)